

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM JALIN MATRA di DESA MUNGGU KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Desa Munggu adalah sebuah desa yang secara administratif berada di dalam Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini adalah desa yang terluas di Kecamatan Bungkal dan terletak di daerah pegunungan. Keadaan Desa Munggu jika dilihat dari segi penduduknya termasuk desa yang padat penduduk. Kebanyakan penduduk desa munggu adalah bermata pencaharian sebagai petani baik yang memiliki lahan sendiri maupun bekerja sebagai buruh tani. Beberapa masyarakat ada yang bekerja sebagai pedagang, pembuat batu bata, dan mendirikan toko di pinggir jalan maupun menjual jajanan pasar. Sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai PNS yang bekerja di sekolahan dan kantor kecamatan.¹

Dari segi pendidikan, masyarakat desa munggu memang dalam taraf rendah. Masih banyak remaja yang hanya sampai di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sebagian sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).Keadaan ini dikarenakan penghasilan orang tua yang kurang untuk menyekolahkan putra- putrinya untuk sampai di tingkat SMA atau perguruan tinggi. Akhirnya para remaja di Desa Munggu ada yang pergi ke luar kota

¹ Sukamto, Wawancara02, 01/06/ 2017.

maupun ke luar negeri untk membantu perekonomian keluarga mereka. Dan tidak jarang yang membantu keluarganya menjadi petani.

Dari segi Sumber Daya Alam (SDA), Desa Munggu adalah desa yang memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dikelola yang bernilai ekonomi. Sangat banyak tanaman pangan yang dapat dijadikan makanan ringan seperti ketela, jagung, ubi jalar, dan tanaman lainnya.²

B. Latar Belakang Program Jalin Matra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based growth) dan pangarusutamaan gender.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode 2014- 2019, dimana Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu “ Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” dan dengan misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”. Merupakan kesinambungan dan sekaligus peningkatan dari visi sebelumnya yaitu “ Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”.³

Visi misi serta rencana strategis yang dijanjikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada rakyat jawa timur menunjukkan konsistensinya terhadap

² Sukamto, Wawancara02, 01/06/ 2017.

³Buku Pedoman Jalin Matra, 1.

komitmen keberpihakan kepada masyarakat yang lemah dan belum beruntung yang disimbulkan dengan ikon “Wong Cilik”.⁴

Dampak dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota adalah angka kemiskinan di Jawa Timur terus mengalami penurunan. Pada posisi Maret 2009 penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 6.022.590 jiwa (16,68%) menurun pada posisi September 2015 menjadi 4.775.970 jiwa (12,28%). Ini berarti selama kurun waktu enam tahun telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1.246.620 jiwa (4,40%).⁵

Berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPDJM) serta dalam upaya untuk menumbuhkembangkan modal dasar capaian pembangunan pada periode pertama, maka pada periode kepemimpinan Gubernur Jawa Timur 2014-2019 berkomitmen untuk meningkatkan dan memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan yang diwujudkan melalui Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA).⁶

Program Jalin Matra merupakan program yang didesain secara khusus dan inklusif bagi masyarakat yang belum beruntung secara ekonomi, sosial, budaya (Wong Cilik) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pendataan Program

⁴Ibid.

⁵Ibid. 2

⁶Ibid.

Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 dengan status kesejahteraan 30 % terendah.⁷

Program Jalin Matra ini dirancang memiliki 3 (tiga) kegiatan unggulan yaitu:

Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM), yang merupakan kelanjutan program Jalin Kesra dengan sasaran rumah tangga dengan status kesejahteraan 1- 5 % terendah (Desil 1);

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan sasaran kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dengan tingkat kesejahteraan 1- 10 % terendah (Desil 1) dan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dengan sasaran rumah tangga dengan status kesejahteraan 11- 30 % terendah (Desil 2 dan 3).⁸

Pada tahun anggaran 2016 ini, Program Jalin Matra PK2 melanjutkan Pilot Project Jalin Matra PK2 Tahun Anggaran 2015, secara khusus membidik kelompok rumah tangga yang berada pada desil 2 dan desil 3 atau mereka yang berada dalam kategori kelompok Rumah Tangga Hampir Miskin (RHTM). Dalam konseptualisasinya Robert Chambers kelompok RHTM tersebut lazim disebut sebagai kelompok masyarakat yang rentan menjadi miskin.⁹

Secara sederhana, kelompok masyarakat yang rentan menjadi miskin lazim digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang rapuh, ringkih dan

⁷Ibid., 3.

⁸Ibid.

⁹Ibid., 4.

tidak memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai tekanan sosial dan ekonomi yang melanda kehidupannya seperti adanya kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari (sembako), kebutuhan untuk pengobatan anggota keluarga yang sakit, terjadinya gagal panen, adanya bencana alam, dan berbagai tekanan lain yang berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka.¹⁰

Melalui Jalin Matra PK2 Tahun Anggaran 2016 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap berkomitmen untuk menolong kelompok masyarakat yang rentan berada pada desil 2 dan 3 agar tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan atau kelompok desil 1.¹¹

Berdasarkan Jawa Timur yang berada pada desil 2 sebesar 1.189.670 rumah tangga atau sebesar 3.932.347 jiwa, jumlah pada desil 3 sebesar 1.189.652 rumah tangga atau sebesar 3.527.666 rumah tangga atau 7.460.013 jiwa tersebut menjadi sasaran pelaksanaan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) tahun 2016.¹²

Secara esensial, RTHM yang berada di desil 2 dan 3 adalah rumah tangga yang dalam kesehariannya sebenarnya relatif cukup mampu dalam mencukupi kebutuhannya, tetapi jika ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhinya.¹³

Sejalan dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Jalin Matra PK2 tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

¹²Ibid., 5.

¹³Ibid.

upaya untuk memperkuat posisi desa dalam mensejahterakan masyarakat desa, memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan. Oleh karena itu, melalui Jalin Matra PK2 tahun 2016 diharapkan akan memperkuat keberadaan kelembagaan baru di pedesaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dalam konteks ini, Jalin Matra PK2 tahun 2016 akan menempatkan BUMDesa sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat pedesaan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian di pedesaan.¹⁴

Pengelolaan Jalin Matra PK2 dilakukan berdasarkan beberapa prinsip pengelolaan, yaitu: dikelola untuk mengembangkan potensi ekonomi produktif, sesuai dengan ekonomi spesifik kawasan, dilakukan secara kompetisi sehat, berbasis potensi lokal, mengedepankan kreativitas dan kearifan lokal serta dana yang diberikan dilakukan secara bergulir.¹⁵

Tujuan umum Jalin Matra PK2 adalah untuk membantu agar masyarakat rentan yang berada pada desil 2 dan desil 3 tidak terperosok pada desil 1 (satu). Sedangkan tujuan khusus Jalin Matra PK2 adalah:

1. Mendorong masyarakat rentan agar mampu mengatasi kerentanannya sendiri berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya;
2. Mendorong agar masyarakat rentan mampu melakukan kegiatan ekonomi produktif berdasarkan pada potensi sosial ekonomi lokal di desanya;

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid., 6.

3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya BUMDesa yang mampu mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perekonomian pedesaan.¹⁶

C. Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program Jalin Matra Tahun 2016

Dalam pelaksanaan Jalin Matra PK2 memiliki sasaran yaitu dengan merujuk kepada data PPLS tahun 2011. Pada tahap awal, diprioritaskan pada Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan kriteria sebagai berikut: RTS yang masuk ke dalam kategori rumah tangga miskin pada desil 2 dan 3; RTS calon penerima dana pinjaman harus berusia produktif, yaitu usia antara 15- 65 tahun; Diutamakan RTS yang memiliki potensi untuk melakukan usaha produktif, yaitu: (i) RTS yang memiliki usaha produktif; (ii) RTS yang memiliki rencana untuk melakukan usaha produktif atau yang berpotensi melakukan usaha produktif;¹⁷ RTS yang telah memenuhi kualifikasi tersebut, diharapkan secara sukarela membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) dengan jumlah anggota sebanyak 5 sampai dengan 10 rumah tangga, baik yang memiliki potensi usaha yang sejenis maupun tidak sejenis, atau memiliki kedekatan tempat tinggal.

Pelaksanaan Jalin Matra PK2 ini tidak dilakukan diseluruh wilayah di Provinsi Jawa Timur. Melainkan hanya diperuntukkan bagi desa- desa yang memiliki rumah tangga yang masuk ke dalam kategori desil 2 dan 3 minimal 100 rumah tangga, memiliki potensi sumber daya alam yang dapat

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid., 7.

dikembangkan, memiliki Profil Desa dan melakukan entry data website Profil Desa, memiliki BUMDesa dan atau berpotensi membentuk BUMDesa.¹⁸

D. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Usaha dalam Pandangan Jalin Matra

Verifikasi adalah kegiatan pengecekan rencana usaha dengan kondisi lapangan pokmas secara actual dan faktual dengan cara melakukan kunjungan lapangan ketempat usaha. Verifikasi dilakukan oleh pendamping kabupaten bersama dengan pengelola BUMDesa dan pendamping desa.

Penilaian kelayakan usaha adalah kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap rencana usaha pokmas yang diajukan kepada BUMDesa untuk memperoleh pinjaman murah dana Jalin Matra PK2.¹⁹ Penilaian kelayakan usaha dilakukan oleh pendamping kabupaten bersama dengan pengelola BUMDesa dan pendamping desa dengan menggunakan indicator 5C, dimana minimal indicator capacity dan indicator character harus terpenuhi, dan dapat mensyaratkan jaminan (coleteral) sebagai bentuk kehati-hatian. Indikator 5C tersebut adalah sebagai berikut:

Capacity adalah kapasitas atau kemampuan RTS dalam menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan sehingga diharapkan RTS mampu mengembalikan pinjaman dana Jalin Matra PK2. Capacity juga diartikan sebagai kemampuan RTS untuk mengembalikan pinjaman.

Character adalah sifat dan perilaku calon peminjam, positif atau negative atau disebut sebagai kemauan RTS untuk membayar pinjaman.

¹⁸Ibid.

¹⁹Ibid.,45.

Collateral adalah jaminan atau agunan dalam bentuk aset berharga yang menjadi jaminan usaha. Collateral yang dilakukan tidak semata-mata berupa aset atau dokumen berharga milik peminjam. Namun usaha yang dilakukan RTS merupakan collateral yang utama.

Condition adalah keadaan ekonomi yang mempengaruhi usaha RTS yaitu: inflasi, tingkat suku bunga, daya beli masyarakat, bahan baku, dan faktor lain yang mempengaruhi usaha RTS. Capital adalah modal yang dimiliki oleh RTS calon peminjam. Semakin banyak modal usaha, semakin serius RTS menjalankan usahanya.

Tahapan penilaian kelayakan usaha dilakukan dengan cara mengundang seluruh ketua dan perwakilan anggota pokmas untuk menghadiri penilaian kelayakan usaha, kemudian penilaian kelayakan usaha dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) atau berdasarkan kearifan lokal yang dilaksanakan oleh BUMDesa, difasilitasi oleh pendamping Kabupaten dan dihadiri oleh pendamping Kabupaten, Pengelola BUMDesa, Kepala Desa, Pendamping Desa serta Ketua dan perwakilan anggota pokmas;²⁰

Masing-masing ketua pokmas memberikan penjelasan terkait rencana usaha pokmas yang akan dilakukan. Masing-masing kelompok dapat memberikan tanggapan dan penilaian terhadap rencana usaha dan penilaian terhadap rencana usaha kelompok yang lain secara terbuka. Berdasarkan hasil presentasi dan penilaian antar kelompok kemudian pendamping kabupaten

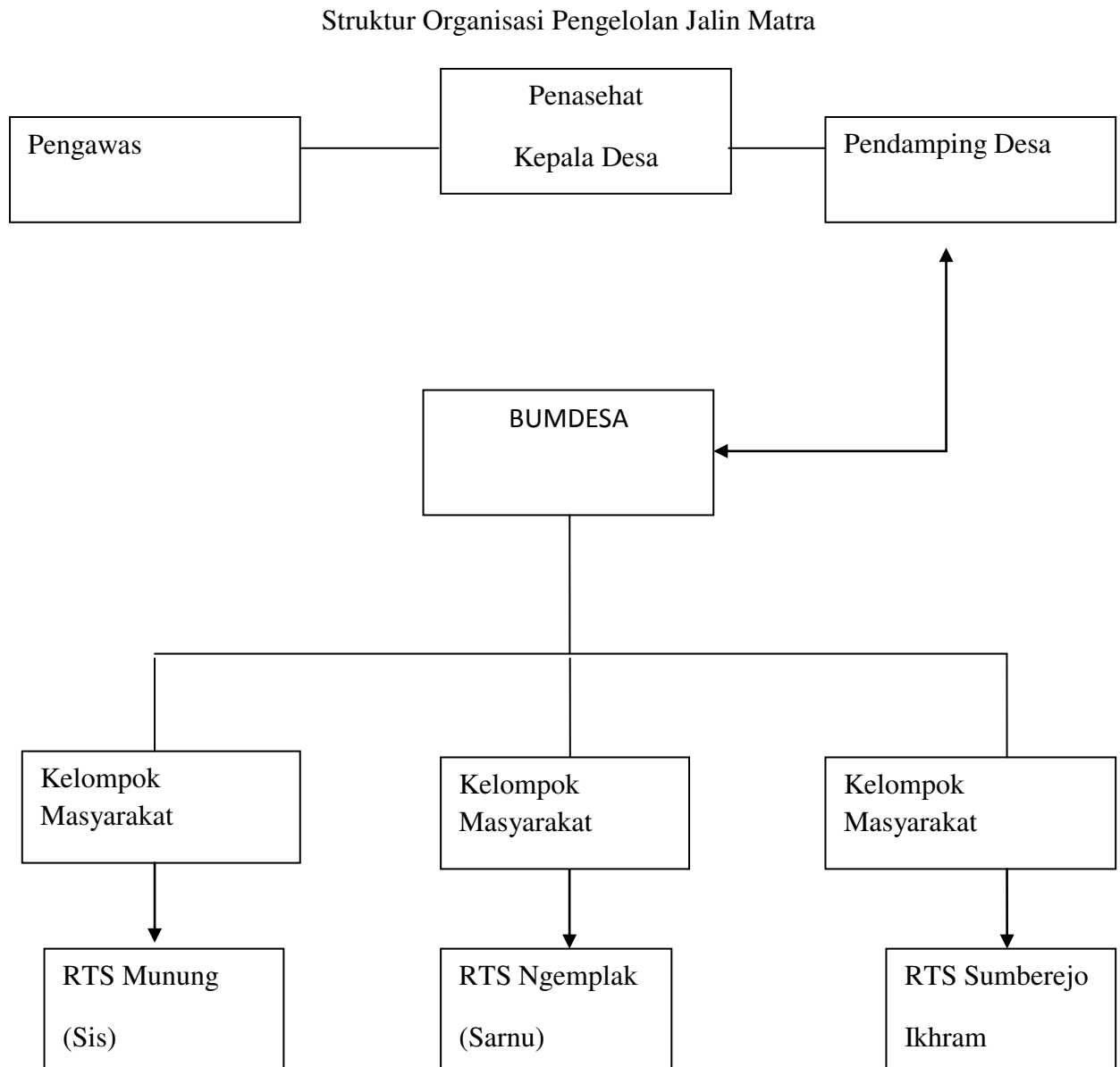
²⁰Ibid., 46.

bersama-sama dengan pengelola BUMDesa dan Pendamping Desa menyusun ranking berdasarkan skor/ nilai hasil kelayakan usaha.

Berdasarkan ranking penilaian tersebut kemudian di tetapkan nama-nama pokmas, jenis usaha dan plafon pinjaman yang akan didanai melalui BUMDesa dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang dimiliki oleh BUMDesa dan prinsip kehati-hatian. Usaha yang berbasis pada potensi desa diprioritaskan untuk memperoleh dana pinjaman PK2. Hasil penilaian kelayakan usaha dan kompetisi sehat selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.²¹

²¹Ibid., 47.

E. Struktur Organisasi Pengelola BUMDesa



Keterangan:

1. Kepala Desa, Pengawas dan Pendamping melakukan koordinasi dan pengawasan kepada BUMDesa.
2. BUMDesa Mendistribusikan modal usaha kepada masyarakat melalui Ketua RTS

F. Proses Pendistribusian Modal Usaha Jalin Matra Tahun 2016 di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Proses pendistribusian modal usaha sangat mempengaruhi keberhasilan tersalurnya modal usaha terhadap RTS yang memiliki usaha atau yang berkeinginan mendirikan sebuah usaha. Dalam pelaksanaan pendistribusian modal usaha harus sesuai dengan buku pedoman Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan Jalin Matra tahun 2016 yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penyaluran modal usaha merupakan tanggung jawab pengelola BUMDesa yang telah mendapatkan amanah oleh pemerintah desa. Pengelola menyediakan dana sebesar Rp 90.000.000 untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang sudah menjalankan usaha baik yang sudah berjalan dengan lancar maupun yang masih pemula, serta kepada masyarakat yang ingin mendirikan usaha. Jangka waktu pelunasan pinjaman ini adalah 10 bulan dengan jasa sebesar 0.5 % dari besaran pinjaman. Untuk pembayaran angsuran dapat dilakukan setiap bulan di kantor Kepala Desa Munggu.

Pada pendistribusian kloter pertama pada bulan Oktober 2016, pengelola BUMDesa membuat kelompok masyarakat (Pokmas) di tiga (3)

dusun yaitu dusun Munung, dusun Ngemplak dan dusun Sumberejo. Kelompok masyarakat ini terdiri dari beberapa RTS yang memiliki usaha yang berbeda- beda. Untuk ketua pokmas dusun munung diketuai oleh bapak Sis Sutoto dengan anggota RTS berjumlah 10 orang. Dusun Ngemplak di ketuai oleh bapak Sarnu dengan anggota RTS sejumlah 22 orang. Sedangkan dusun Sumberejo diketuai oleh bapak Giran dengan RTS 3 orang.²²

Dalam verifikasi dan peninjauan kelayakan usaha kloter pertama pengelola BUMDesa mendokumentasikan rumah dan jenis usaha RTS untuk dilaporkan kepada pendamping Kabupaten dan Provinsi sebagai salah satu bukti bahwa RTS memiliki usaha. Pihak pendamping desa, kabupaten dan provinsi juga melihat secara langsung kondisi usaha masyarakat Desa Munggu yang mengajukan peminjaman kepada BUMDesa.

Setelah dinilai sudah sesuai dengan peninjauan kelayakan usaha maka seluruh pokmas diwajibkan mengumpulkan persyaratan untuk mencairkan modal dari BUMDesa. Syarat yang harus di lampirkan adalah Foto kopi KTP 1 lembar, materai 6000 satu lembar, dan foto usaha yang dijalankan. Setelah semua persyaratan telah terpenuhi maka modal usaha dapat dicairkan oleh ketua pokmas.

Peminjaman modal usaha kloter pertama dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2016 senilai Rp 90.000.000 dengan jumlah RTS sebanyak 35 orang. Pada kloter kedua yaitu pada bulan Desember jumlah uang yang dipinjamkan sejumlah angsuran yang telah dibayarkan oleh RTS pada

²²Siti Nur Fadila, Wawancara01,01/6/2017.

kloter pertama yaitu sebesar RP 21. 750.000. jumlah peminjam pada kloter dua ini berjumlah 6 RTS yang berasal dari tiga dusun yaitu Munung, Ngemplak Dan Sumberejo. Pada pendistribusian kedua ini, sudah tidak ada verifikasi dan tinjauan terhadap kelayakan usaha RTS dari pendamping kabupaten, provinsi akan tetapi dilakukan oleh pendamping desa Munggu. Pada kloter kedua ini, para aparat desa sudah mulai meminjam modal usaha tetapi mereka tidak memberikan alasan yang jelas kepada pengelola BUMDesa. Karena merasa tidak enak hati kepada aparat desa, maka pengelola BUMDesa memberikan pinjaman dari program Jalin Matra tersebut.²³

Pada kloter ketiga yaitu pada bulan Desember RTS yang mengajukan pinjaman modal usaha sebanyak 6 orang. Pada bulan Maret dilakukan penyaluran modal usaha. Pada kloter keempat ini ada satu RTS yang melakukan peminjaman. Pada kloter kelima yaitu pada bulan April ada tiga orang yang mengajukan peminjaman modal usaha yaitu berasal dari dusun Sumberejo.

Dalam menangani masalah kredit macet pada angsuran modal usaha, para pengelola melakukan tindakan peneguran kepada yang bersangkutan, apabila teguran tersebut tidak diindahkan maka akan diberikan surat peringatan. Apabila hal tersebut tetap tidak dapat memberikan efek jera kepada peminjam maka pengelola dapat mengambil barang dari rumah peminjam untuk dijual dan digunakan untuk melunasi hutangnya. Apabila

²³Siti Nur Fadila, Wawancara01,01/6/2017.

masih ada sisa uang dalam pelunasan hutang, maka uang akan dikembalikan kepada RTS yang bersangkutan.²⁴

G. Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha Jalin Matra tahun 2016 di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Pinjaman modal usaha yang sudah disalurkan oleh BUMDesa kepada masyarakat memiliki tujuan utama yaitu membantu masyarakat dalam menlancarkan usaha maupun membuat usaha bagi pemula. Dana ini dapat digunakan sebagai tambahan modal maupun dijadikan modal awal usaha. Dengan sistem pengembalian setiap bulan serta jasa yang ringan diharapkan tidak memberatkan para peminjam dalam mengembalikan pinjamannya.

Pengelolaan modal usaha harus digerakkan pada bidang yang produktif. Hal ini diharapkan dapat memberikan perubahan pada ekonomi masyarakat dan mereka dapat mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu. Pengelolaan modal usaha oleh setiap anggota kelompok masyarakat memiliki perbedaan. Setiap RTS memiliki usaha yang berbeda tetapi sebagian ada juga yang sama.

Seperti anggota kelompok masyarakat di Dusun Munung, mengelola modal usahanya dengan cara menanam cabai, mendirikan warung, ada yang digunakan untuk meningkatkan usaha toko, usaha donat, menjual peralatan pertanian, tetapi ada juga yang menggunakannya untuk melunasi hutangnya, dan membeli motor.²⁵

Sedangkan anggota kelompok masyarakat di Dusun Ngemplak pengelolaan modal usaha di gunakan untuk beternak kambing, membuat batu

²⁴Siti Nur Fadila, Wawancara01,01/6/2017.

²⁵Siti Nur Fadila, Wawancara,01/6/2017.

bata, berdagang pisang, berdagang gorengan, berdagang kunyit, berjualan dawet. Tetapi ada juga yang tidak jelas pengelolaan pinjaman modalnya.

Untuk pengelolaan yang berada di Dusun Sumberejo modal usaha digunakan untuk membuka toko, berdagang pisang, berdagang kayu, dan beternak kambing. Tetapi ada RTS yang tidak jelas penggunaan modal usahanya.